

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Salim HS. 2016 *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.”*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqqie, Jimly. 2006 *“Hukum Acara Peraturan Perundang-Undangan”*. Konstitusi Press.
- Bambang Sunggono. 2003 *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ali Marwan, *“Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Putusannya”*. Medan. Enam Media.
- Fara Syah Rezah, Nurul Qamar. 2020 *“Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”*. Makassar, Social Politik Genius.
- Ahmad Redi, *“Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”*. Jakarta Timur. Sinar Grafika
- Mangku Dewa Gede Sudika. 2020 *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Jawa Tengah. "Lakeisha.
- Sadi Muhammad, Kun Budianto. 2021 *“Hukum Administrasi Negara”*. Jakarta. Kencana.
- Maria Farida Indrati. 1998 *“Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan”*. Yogyakarta, Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Tedi Sudrajat. 2017 *“Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan”*. Jakarta. Sinar Grafika.
- R.V.P. Hartono. 2015 *“Peran Kepala Daerah Dalam Membangun Daerah”*. PKn Progresif.
- Janner Simarmata. 2021 *“Covid-19 Seribu Satu Wajah”*. Medan, Yayasan Kita Menulis.
- HR Ridwan. 2008 *“Hukum Administrasi Negara”*. Jakarta, Raja GrafindoPersada.
- WJS. Poewadarminta, *“Kamus hukum Bahasa Indonesia”*. Jakarta. Cetakan Delapan.

Elidar Sari. 2013 *"Hukum Administrasi Negara"*. Medan. CV BieNa Edukasi.

Sunarno Siswanto. 2012 *"Hukum Pemerintahan Daerah"*. Sinar Grafika.

ilImar, Aminudin. 2014 *"Hukum Tata Pmerintahan"*. Jakarta. Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2016 *"Penelitian Hukum"*. Jakarta, Kencana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Edisi Ketiga, Balai Pustaka

Soeroso R, 2017 *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta, Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2000 *"Ilmu Hukum"*. Bandung. Citra Aditya.

Jurnal

A. Setiawan. *"Lembar Kegiatan Literasi Sainifik Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit CoronaVirus 2019 (COVID-19)"* 2, no. 1 (2020).

Soerjono Soekanto, *"Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II."* 1985 hlm 40.

Atika Thahira. *"Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum"*. (Cendekia Hukum, no. 5 2020).

Bagus, Brahmana Ida. *"Tindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali."* Kertha Desa. 8, no. 8.

Zuleha. *"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa."* Samudra Keadilan 16, no. 1 (2021).

Wicipito Setiadi. *"Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan."* Legislasi Indonesia. 6, no. 4 (2009).

Ghufran Syahputera Walla, dkk. *"Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar."* Ilmu Hukum. 1, no. 9 (2021).

Sri Nur Hari Susanto. *"Adminitrative Law & Governance."* Jurnal Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi 2, no. 1 (2019).

Diana Rita br Ginting, dkk. *"Analisis Yuridis Penerapan Protokol Kesehatan"*

Wilayah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Bupati Karo No 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.” Retentum. 3, no. 1 (2022).

Muhammad Musta'. “*Pendidikan Berbasis Pengalaman Menurut Pemikiran John Dewey Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam.*” *Telaah Buku Experiens and Education Penulis John Dewey*, (2016).

Widiati, E. Prajwalita, and Haidar Adam. “*Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah*”. *Yuridika 27, no. 1 (2012).*

I Nyoman Puspa Negara, Putu Edgar Tanaya, “*Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Pengaturan Kepala Daerah (Studi Kasus UU/2011 Dan UU 23/2014)*,” *Jurnal Kertha Wicara 10, no. 10 (2021).*

Skripsi

Caniago, Fauzan. “*Denda Administratif Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam.*” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

Deddi Sitepu, “*Analisis Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Prinsip-Prinsip Demokrasi.*” Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016

Bagir manan, “*Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah.*” Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Didaerah.

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dikota Tanjungpinang.

Internet/Website

Data World Health Organization (WHO), Worldmeters.info (UN Population Division), BPS, per tanggal 04 Oktober 2022 Pukul 09.47 WIB.

Pengamat Nilai Perwako Tanjungpinang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes Cacat Materil, 26 November 2020, <https://sijoritoday.com/2020/11/26/pengamat-nilai-perwako-tanjungpinang-tentang-penerapan-disiplin-dan-penegakan-hukum-prokes-cacat-materil/> diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 15.17. WIB.

Sanksi Denda Pelanggaran Prokes di Perwako Tanjungpinang 44 Tahun 2020 Dikritik Wakajati Kepri, 22 Juli 2021, <https://batam.tribunnews.com/2021/07/22/sanksi-denda-pelanggar-prokes-di-perwako-tanjungpinang-442020-dikritik-wakajati-kepri> diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 16.04. WIB.

Deepublish, "Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara Membuat, dan Contoh Lengkap", <https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/>, diakses pada 13 Oktober 2022 pukul 14.35.

<https://kepriau.com/profile-tanjungpinang/>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023, pukul 01:11.

Profil Kepala Daerah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang. JDIH Kota Tanjungpinang. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023, pukul 01:23.

Hasil Wawancara dengan Nidia Widiastuti Selayar (Analis Hukum Ahli Muda, 24 Januari 2023, Pukul 09.12 WIB, Sekretariat Walikota Tanjungpinang).

(<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.htm>), Diakses pada tanggal 1 November 2023, pukul 16.23.

